

**IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH SATUAN
PETUGAS POSKO DESA DI KABUPATEN OGAN
ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

IMELDA R. R. TAMBUNAN

NIM. 07011281621093

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
JUNI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH SATUAN
PETUGAS POSKO DESA DI KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

IMELDA R. R. TAMBUNAN
07011281621093

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2021

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 05 April 2021.

Indralaya, 05 April 2021

Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

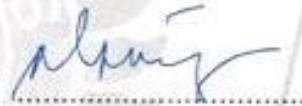


Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



3. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002



4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Mengetahui:
Dekan FISIP

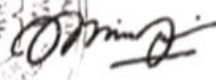


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Suryan Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan menjadi kinerja kebijakan publik yang dapat memecahkan persoalan di lingkungan masyarakat.”

(Taufiqurokhman)

Kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orangtuaku,
P. Tambunan dan R. Siburian**
- 2. Adik-adikku,
Patriyani Tambunan dan
Govinda Tambunan**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir”** tepat pada waktunya.

Selama masa penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtuaku tercinta Panahatan Tambunan dan Rohani Siburian yang tidak pernah luput mendoakan, memberi dukungan serta bekerja keras untuk anak-anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi saran serta masukan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini.

7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi saran serta masukan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
10. Seluruh pegawai dan staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan arahan dan memudahkan penulis dalam proses pengambilan data.
11. Kevin Leon Kristiadi Sinambela yang selalu menjadi tempat berbagi di masa-masa sulit serta selalu mendoakan dan memberikan semangat, dukungan serta nasehat.
12. Teman seperjuanganku angkatan 2016 gang Buntu.
13. Guru Sekolah Minggu HKBP Efrata yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Skripsi ini disusun dan dibuat agar pembaca dapat mengetahui mengenai “Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan

Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir”. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi tercapainya skripsi yang baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Skripsi ini selesai dengan tepat waktu. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, 2021



Imelda R. R. Tambunan

ABSTRAK


Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan konsep teori Implementasi Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan teori implementasi tersebut, untuk mengetahui kinerja organisasi terdiri dari enam dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan belum maksimal. Pada tahun 2019 masih ada kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disebabkan beban kerja Satuan Petugas Posko Desa sangat berat karena bidang kerjanya sangat luas. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa agar Satuan Petugas Posko Desa berhasil dalam melaksanakan tugasnya maka sebaiknya jumlah petugas ditambah, adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar petugas, instansi dan masyarakat terkait.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pembimbing I


Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II


Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juni 2021


Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to find out the performance over the implementation of land and forest fire control by the village officers post in the regency of Ogan Ilir with using the Van Meter and Van Horn implementation theory concepts. Based on the implementation theory, to determine organizational performance consist of six dimensions, namely size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents communication between organizations and the activities of the implementers, attitudes and tendencies of the implementers, as well as the economic environment, social and political. The method used in this research is a qualitative method. The result of this study showing that the performance of Sungai Rambutan village post unit is not yet maximized. On the year of 2019, there is still occurred land and forest fire. It is caused by the responsibilities of the village post unit are very heavy due to their huge field of work. Based on the result of this study recommends that in order to contrives the village post unit succeed in implementing their duty, it is best that the amount of the officer being increased, the availability of a clear standard operational procedure, also the improvement of communication and coordination between officer, instance, and related society.

Keywords: Implementation of Policy, Control of Forest and Land Fires Disaster

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

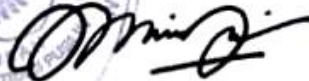
Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, June 2021

*Chairman Of The Departement Of Public Administration
Faculty Of Social And Political Science
Sriwijaya University*



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 10 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 10 |
| BAB II | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Landasan Teori | 11 |
| 2.1.1 Kebijakan Publik | 11 |
| 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik | 14 |
| 2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn | 15 |
| 2.2 Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 161/KEP/BPBD/2019 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan | 16 |
| 2.3 SK Nomor 35/KEP/BPBD/2019 Tentang Perpanjangan Satuan Petugas Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Petugas Lapangan (Masyarakat) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 | 17 |
| 2.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan | 17 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 21 |
| BAB III | 28 |
| METODE PENELITIAN | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1 Jenis Penelitian | 28 |
| 3.2 Aspek Penelitian | 28 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 30 |
| 32 | |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 32 |
| 3.4 Informan Penelitian | 33 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 3.6 Teknik Keabsahan Data | 35 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 36 |
| BAB IV | 38 |
| PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian | 38 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Desa Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir | 38 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan | 39 |
| 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan | 41 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan | 42 |
| 4.1.5 Alur Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Posko Desa Oleh Manggala Agni | 43 |
| 4.1.6 Dasar Hukum Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan | 44 |
| 4.2 Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir | 45 |
| 4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan | 45 |
| 4.2.2 Sumber Daya | 50 |
| 4.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana | 57 |
| 4.2.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana | 63 |
| 4.2.5 Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana | 67 |
| 4.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik | 71 |
| PENUTUP | 77 |
| 5.1 Kesimpulan | 77 |
| 5.2 Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN | 84 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019..... | 3 |
| 2. Daftar Satuan Petugas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir..... | 8 |
| 3. Penelitian Terdahulu..... | 22 |
| 4. Fokus Penelitian..... | 30 |
| 5. Daftar Petugas Posko Desa Sungai Rambutan..... | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1. Jumlah Kejadian Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019..... | 3 |
| 2. Alur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satgas Posko Desa..... | 7 |
| 3. Jumlah Kejadian Karhutla Perdesa di Kabupaten Ogan Ilir..... | 9 |
| 4. Kerangka Pikir..... | 20 |
| 5. Peta Desa Sungai Rambutan..... | 39 |
| 6. Posko Desa Sungai Rambutan..... | 40 |
| 7. Struktur Organisasi Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan..... | 42 |
| 8. Alur Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa..... | 43 |
| 9. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan..... | 56 |
| 10. Struktur Birokrasi Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan..... | 59 |
| 11. Alur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan..... | 60 |
| 12. Koordinasi yang Dilakukan Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan..... | 66 |
| 13. Pemadaman Dini Oleh Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan..... | 70 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|--|
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| BPBD | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| BNPB | : Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| ISPA | : Infeksi Saluran Pernapasan Akut |
| Karhutla | : Kebakaran Hutan dan Lahan |
| OI | : Ogan Ilir |
| Perda | : Peraturan Daerah |
| Satgas | : Satuan Petugas |
| SK | : Surat Keputusan |
| SOP | : Standar Operasional Prosedur |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang selalu menjadi sorotan publik. Dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan ini sudah menyebabkan kerugian bagi rakyat dan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek seperti gangguan kesehatan, sosial, ekologi, ekonomi dan juga reputasi. Kerugian yang paling jelas terlihat adalah kerugian dalam bidang kesehatan. Asap dari kebakaran hutan dan lahan menyebabkan munculnya berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Berbagai macam kerugian tersebut akan terus merebak dan akan terus terulang apabila kebakaran tidak ditangani secara serius oleh masyarakat maupun pemerintah. Untuk mencegah dan mengurangi semua kerugian dan dampak dari bencana tersebut maka kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat dibutuhkan.

Untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan secara maksimal, maka perlu dikaji penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari akar masalahnya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan terjadi secara terus menerus, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan dan lahan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, serta cuaca yang terlalu panas saat musim kemarau. Akan tetapi kebakaran yang terjadi karena faktor alam ini sangat jarang terjadi. Hampir sembilan puluh sembilan persen kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh ulah manusia. Kebakaran hutan dan lahan karena ulah manusia bisa terjadi karena berbagai kelalaian seperti puntung rokok yang dibuang di area hutan dan lahan, api unggun di hutan yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, dan pembakaran sampah. Satu lagi faktor yang disebabkan oleh manusia adalah pembakaran lahan dengan sengaja, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran lahan dan hutan adalah cara paling mudah dan murah untuk mengubah lahan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, serta lahan pertanian lainnya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kebakaran hutan

dan lahan terjadi secara berulang hampir setiap tahun dan menimbulkan titik-titik rawan karhutla di beberapa wilayah provinsi di Indonesia.

Hutan dan ekosistem darat merupakan salah satu bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau disebut juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Adapun tujuan dari SDGs yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Salah satu tujuan dari SDGs adalah melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan) dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem darat terutama hutan yang menjadi paru-paru dunia.

Salah satu provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan adalah Provinsi Sumatera Selatan. Setiap tahun Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan, dan tahun 2019 menjadi tahun dengan jumlah kebakaran lahan dan hutan paling tinggi serta durasi kebakaran yang lama selama empat tahun terakhir.

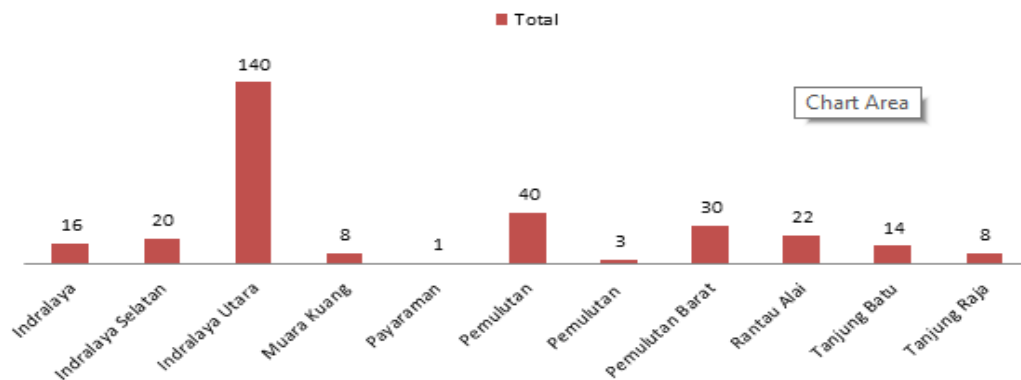
Tabel 1.1 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019

| Tahun | 2016 (Ha) | 2017 (Ha) | 2018 (Ha) | 2019 (Ha) |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Luas | 8.784,91 | 3.625,66 | 16.226,60 | 328.457,00 |

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa selama empat tahun terakhir jumlah kebakaran hutan dan lahan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 328.457 kebakaran dengan durasi dari bulan maret sampai bulan november akhir. Salah satu kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten Ogan Ilir. Sepanjang tahun 2019 di Kabupaten Ogan Ilir terjadi sebanyak 302 kebakaran hutan dan lahan yang dapat dilihat di dalam diagram dibawah ini :

Diagram 1.1 Jumlah Kejadian Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019



Sumber : BPBD Ogan Ilir, 2020

Berdasarkan diagram di atas, diketahui jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Indralaya Utara adalah wilayah dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan yang paling tinggi di Kabupaten Ogan Ilir dengan total kejadian sebanyak 140 kebakaran. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah karhutla yang mengalami jumlah peningkatan signifikan adalah membentuk Satuan Tugas Posko Desa. Pembentukan Satgas Posko Desa ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum 1./3/2016 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan. Di dalam peraturan ini, pada pasal 16 dijelaskan bahwa salah satu organisasi yang ditunjuk sebagai pelaksana penanganan karhutla adalah Satuan Tugas Pengendali Kabupaten/Kota. Satgas ini dibentuk atau ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dijelaskan bahwa Satgas Posko Desa memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Satgas Pengendali Kabupaten/Kota penanganan kebakaran hutan dan lahan wajib membentuk kesekretariatan yang disebut posko krisis kebakaran hutan dan lahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 161/KEP/BPBD/2019 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan, dijelaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi berlangsung mulai awal Maret 2019 secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar serta prosedur penanganan sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang dimaksud maka perlu ditetapkan status keadaan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan yang berlangsung sejak ditetapkannya keputusan ini yaitu pada tanggal 1 Maret sampai dengan Oktober 2019. Di dalam surat keputusan ini juga, pada keputusan nomor tiga dijelaskan bahwa setelah penetapan status keadaan siaga darurat akan ditindaklanjuti dengan membentuk Pos Komando yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa, sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan.

Setelah surat keputusan mengenai Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan tersebut dikeluarkan, maka selanjutnya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengeluarkan Surat Keputusan sebagai wujud dari pelaksanaan Keputusan Bupati yaitu melakukan pembentukan Pos Komando di desa-desa. Adapun Surat Keputusan yang dikeluarkan adalah SK Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 35/KEP/BPBD/2019 Tentang Perpanjangan Satuan Petugas Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Petugas Lapangan (Masyarakat) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019. SK tersebut berisi penunjukan nama-nama yang ditunjuk menjadi anggota Satgas Posko Desa yang terdiri dari anggota BPBD dan juga masyarakat. Satgas Posko Desa ini akan menjadi tim yang pertama turun ke lapangan dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa masing-masing.

Dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya Satgas Desa harus berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. SK yang diterbitkan berdasarkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 35/KEP/BPBD/2019 Tentang Perpanjangan Satuan Petugas Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Petugas Lapangan (Masyarakat) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019. Di dalam Surat Keputusan ini dijelaskan bahwa Satgas Desa mempunyai tugas pokok yaitu mendukung pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka mencegah, mengidentifikasi serta menanggulangi bencana asap .

Satuan Tugas Posko Desa ini memiliki tugas fungsi yang jelas sebagai acuan untuk menjalankan tugasnya dilapangan. Acuan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Satgas Posko Desa Sungai Rambut yaitu berdasarkan Modul Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disusun oleh Manggala Agni. Dalam modul ini ini dijelaskan bahwa terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam setiap tindakan pelaksanaan tugas agar tidak terjadi kesalahan dan agar proses penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan memperoleh hasil yang memuaskan. Secara umum dijelaskan bahwa pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Posko Desa tersebut yaitu :

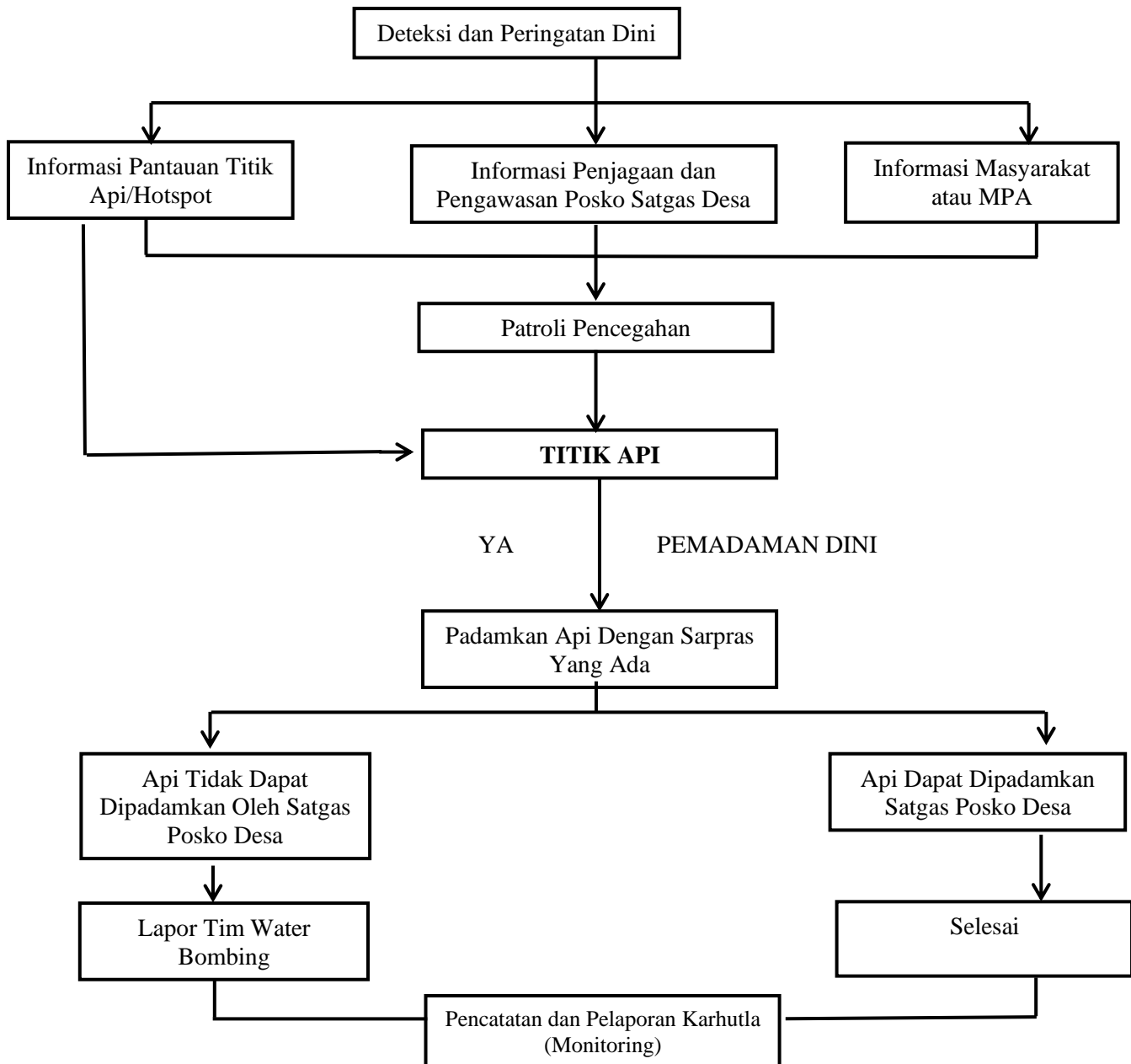
- Sosialisasi Kepada Masyarakat ; dalam tugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Satgas Posko Desa harus melakukan sosialisasi dengan tiga metode pendekatan yaitu sosialisasi secara perorangan, sosialisasi

kelompok dan sosialisasi massal. Sosialisasi ini dilakukan sepanjang tahun, khususnya saat menjelang dan pada musim kemarau.

- Melaksanakan Patroli ; dalam pelaksanaan patroli, petugas Satgas Posko Desa dapat melakukannya dengan berjalan kaki, sepeda motor, maupun menggunakan mobil dengan membawa peralatan pemadaman yang lengkap. Petugas juga harus menentukan sasaran patroli pencegahan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan hotspot dan peringkat bahaya kebakaran. Dalam pelaksanaan patroli, petugas Satgas melakukan peringatan dengan pengeras suara kepada pelaku pembakaran yang terpantau, selanjutnya meminta bantuan untuk penangkapan pelaku dan pemadaman api. Dari hasil patroli, petugas harus melaporkan tiap kejadian kebakaran dan kondisinya secara berjenjang.
- Menggalang Kekuatan Masyarakat ; penggalangan kekuatan masyarakat dilakukan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dalam hal ini petugas Satgas Posko Desa berperan dalam proses pembentukan, perekrutan, pelatihan serta evaluasi Masyarakat Peduli Api. Pembinaan atau pelatihan terhadap masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan.
- Pencatatan dan Pelaporan Kejadian (*Monitoring*) ; petugas Satgas Posko Desa harus melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan secara mendetail seperti koordinat kebakaran, jam, tanggal, bulan, tahun, lokasi dan taksiran kerugian akibat kebakaran, Hasil dari kegiatan *monitoring* ini harus dilaporkan secara menyeluruh dan berjenjang.
- Pemadaman Dini ; pemadaman dilakukan dengan dua cara yaitu pemadaman secara langsung dan tidak langsung. Pemadaman secara langsung dilakukan dengan menyebarkan tanah ke sumber api atau menyemprotkan air ke arah api. Apabila api tidak bias dipadamkan secara langsung maka api dapat dipadamkan secara tidak langsung dengan cara pembuatan ilaran api.

Secara lebih jelas tugas Satgas Posko Desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat melalui bagan dibawah ini :

Bagan 1.1 Alur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satgas Posko Desa Berdasarkan Modul Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber : BPBD Ogan Ilir, 2020

Pada dasarnya, alasan pembentukan Satuan Tugas Posko Desa ini adalah untuk lebih memudahkan proses pengendalian karhutla di Kabupaten Ogan Ilir sehingga dibentuklah tim di desa-desa yang rawan dan sering terjadi kebakaran

hutan lahan. Di kabupaten Ogan Ilir sendiri terdapat 55 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang sering menjadi awal munculnya *fire spot* (titik api), akan tetapi dari 55 desa tersebut terdapat 17 desa paling rawan karhutla yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Desa paling rawan karhutla tersebut sekaligus menjadi 17 desa yang memiliki Satgas Posko Desa, yaitu :

Tabel 1. 2 Daftar Satuan Petugas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir

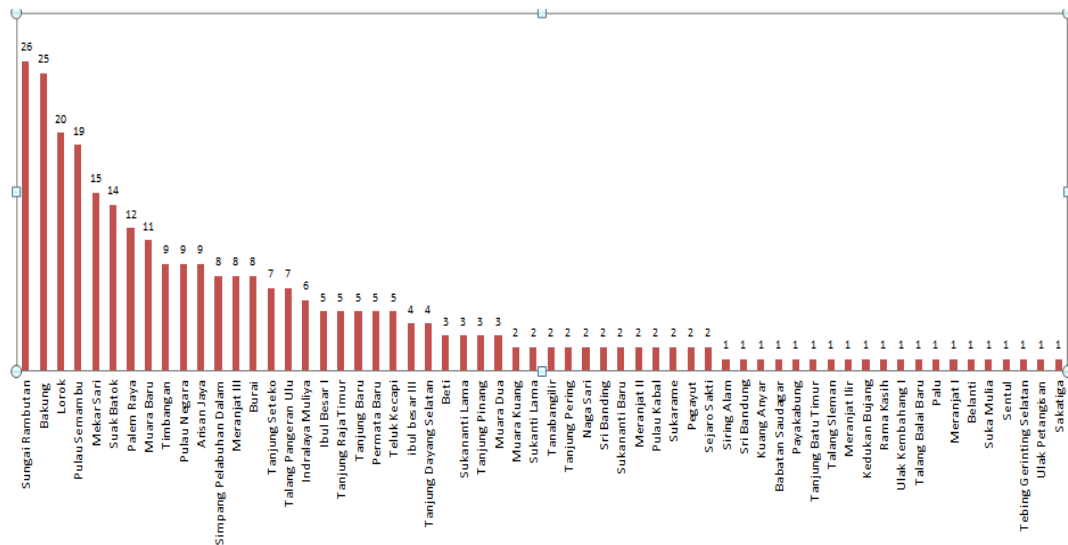
| Kecamatan | Nama Desa |
|----------------------|--|
| 1. Indralaya Utara | 1. Pulau Kabai 2. Lorok 3. Sungai Rambutan 4. Palembang 5. Pulau Semambu |
| 2. Pemulutan | 1. Ibul Besar I 2. Simpang Pelabuhan Dalam 3. Muara Baru |
| 3. Pemulutan Barat | 1. Talang Pangeran Ilir 2. Ulak Kembahang I |
| 4. Indralaya Selatan | 1. Meranjat II |
| 5. Tanjung Batu | 1. Burai |
| 6. Payaraman | 1. Talang Saleman |
| 7. Rantau Alai | 1. Sukananti Baru 2. Mekarsari |
| 8. Muara Kuang | 1. Tanabang Ilir 2. Ramakasih |

Sumber : BPBD Kabupaten Ogan Ilir, 2019

Berdasarkan data desa paling rawan kebakaran hutan dan lahan diatas, desa Sungai Rambutan dipilih sebagai lokasi penelitian karena selama tahun 2019, desa Sungai Rambutan menjadi desa dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan paling tinggi yaitu terjadi sebanyak 26 kebakaran hutan dan lahan dengan luasan kebakaran 104,4 Ha. Persebaran jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di

desa-desa di Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2019 dapat dilihat melalui diagram dibawah ini :

Diagram 1. 2 Jumlah Kejadian Karhutla Perdesa di Kabupaten Ogan Ilir



Sumber : BPBD Ogan Ilir, 2020

Peningkatan jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara signifikan selama tahun 2019 membuat pemerintah melakukan berbagai cara sebagai langkah penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, salah satu contohnya dengan membentuk Satuan Tugas Posko Desa yang baru dibentuk pada tahun 2019 dan bertugas di desa-desa yang telah ditentukan. Di Kabupaten Ogan Ilir terdapat 17 desa yang telah memiliki Satgas Posko Desa. Satgas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir ini adalah sebuah regu/tim yang terdiri dari gabungan anggota BPBD dan masyarakat. Sinergi dari BPBD dan masyarakat ini diharapkan mampu membantu sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan lebih baik.

Akan tetapi pada kenyataannya, setelah dibentuknya tim Satgas Posko Desa ini pada tahun 2019, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir masih tinggi dengan durasi yang lama bahkan paling parah selama empat tahun terakhir yaitu dari awal bulan Maret sampai akhir bulan Oktober dan bahkan karena kebakaran hutan dan lahan masih terus berlanjut, status siaga darurat di Kabupaten Ogan Ilir diperpanjang lagi sampai akhir bulan November. Hal ini tentunya tidak

sesuai dengan hasil yang diharapkan, dimana seharusnya dengan adanya Satgas Posko Desa kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan diselesaikan lebih cepat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya jumlah karhutla meningkat dan durasinya semakin lama.

Berdasarkan data diatas,dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Satgas Posko Desa di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Petugas Posko Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Desa Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Satuan Petugas Posko Desa Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diperoleh konsep tentang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik, terkhusus mengenai konsep keberhasilan kinerja dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan menghasilkan masukan bagi pelaksana kebijakan (implementor) dalam menerapkan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asteriniah, Femi, and Sutina Sutina. 2018. "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Ogan Komering Ilir." *Jurnal Abdimas Mandiri* 1(2): 71–77.
- Cahyono, S. Andy, Sofyan P Warsito, Wahyu Andayani, and Dwidjono H Darwanto. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya." *Jurnal Sylva Lestari* 3(1): 103.
- Yahusafat.M.M, et al. 2016. "implementasi kebijakan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan gambut kabupaten muaro jambi oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi jambi." *Visioner*, 12(4), 675–84.
- Maksum, Mochamad Asep, M Syamsul Maarif, Lailan Syaufina, and Diah Zuhriana. 2019. "Evaluasi Keberlanjutan Program Sustainability Evaluation of Human Resource Capacity Development." : 521–36.
- Muqsith, Leda Al, and Rinto. 2019. "The Strategy Of Regional Disaster Management Agencies In Katingan District In The Handling Of Forest Fire And Peat Land In Katingan Downstream Of Katingan Regency." *Restorica Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 5(2): 26–30.
- Saptawan, Ardiyan et al. 2020. "Criminality and Disaster: The Case of Forest Fires in Sumatra Island, Indonesia." *Disaster Advances* 13(1): 29–37.
- Harahap.D.K, et al. 2017. "strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan persepsi masyarakat di desa dayun kabupaten siak strategy." *JOM Faperta UR*, 4(1): 4–6.

Buku- Buku

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Jatinangor: Unpad Press.

Anderson, James. 1975. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Lexy, Moeleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Dedi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.

Nugraha, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum 1./3/2016 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan.

Dokumen

Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 161/KEP/BPBD/2019 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan.

Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 35/KEP/BPBD/2019 Tentang Perpanjangan Satuan Petugas Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Petugas Lapangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Data Kebakaran Hutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

Skripsi

Arian Nando, Deni. 2017. *Implementasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.